

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

BPS, 2021. *Badan Pusat Statistik Kota Padang*, Padang: BPS.

Christopher. J. Wheelan, 1992, *Small Claim Court-A Comparative Study New York*: Oxford University Press

Djamil, F, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika

Dumairy & [Sumiharti, Yati](#), (Eds)1977, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran.

Gemala Dewi, (Ed). 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Isna Fitria Agustina, 2011, *Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia*, Siduardjo: Umsida Press

Ibrahim Ahmad Harun, 2013, *Buku II Edisi Revisi : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada

Mohammad Daud Ali, 2001. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ni'matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Ridwan Mansyur, 2017, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia

Soejono & Abdurahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,

Zainuddin Ali, M.A. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel Koran dan Jurnal

Aan Anshori, 2016, Digitalisasi Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* . Vol. 7. No.1

Afriana. A & An Chandrawulan, 2019, Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia, *Jurnal Bina Hukum*. Vol 4 No. 1,

Andi Ritonga,Salma,Bakhtiar, 2024, Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani*. Volume 14 No. 1.

Budiatoro, 2018, Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam *Prespektif Historis*,Vol 4, No. 01Throsby, D. 1994.

Hermanto Selisik, AB, 2018, Politik Hukum dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum dan Bisnis*. Vol 4. No. 7, hlm 4.

Kelik Pramudya, 2018, Strategi Pengembangan ekonomi Syari'ah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa (Islamic Economic Development Strategy Through The Strengthening of

The Function of Religious Court in Dispute Resolution), *Jurnal Reich Vinding Media Pembina Hukum Nasional* .Volume 7, Nomor 1

Laheri, P.E., 2018, Implementasi Asas Trilogi Peradilan Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Advokasi*, 8(1)

Noor, M, 2020, Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 53-66.

Qori Imtihan, 2021, Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03)

Salwa Kurnia Dina, 2019, Teori Konsumsi Dalam Islam dan Implementasinya, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 03 Nomor 02

Syamsul Effendi, 2019, Perbandingan Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*. Vol 6, Nomor 2,

Sitorus S, 2018, Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1

Sukardi, S, 2021, Analisa Minat Membaca Antara E-Book dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 4(2), 158-163.

Syafaat Firdaus, 2021, Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court), *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume. 5. Nomor 1)

Tjoneng, A., 2017, Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan permasalahannya. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 93-106.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pengajuan Perkara Melawan Hukum.

D. Internet

Isran Bastian, Hampir 900 Ribu Jiwa Muslim, Ini Data Terbaru Agama Masyarakat Kota Padang. <https://padangkita.com/> BPS, 2021. *Badan Pusat Statistik Kota Padang*, Padang: BPS. BAB 3 Penduduk dan Ketenagakerjaan 2020, hlm.67-93. (diakses pada tanggal 21/08/23)

Direktorat Jenderal Peradilan Agama, “Membedah PERMA Tata Cara Penyelesaian Perkara ekonomi Syari'ah ”<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedahPERMA-tata-cara-penyelesaian-perkara-Ekonomi-Syari'ah..>(Diakses pada tanggal 21/08/23)

SK KMA No 129/KMA/SK/VIII/2019, Petunjuk teknis administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Kelas.1A.Padang.<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/129kmaskviii2019/detail>. (Diakses tanggal 13/11/2023)

Buku Saku PLKH Perdata Oktober 2021, <http://repository.ubharajaya.ac.id> (Diakses pada tanggal 13/11/23).

Sosialisasi hasil pendidikan dan ekonomi syari'ah di *riyadh*, www.pakuningan.go.id/berita/arsip/berita-terkini/654-sosialisasi-hasil-pendidik.(Diakses pada tanggal 21/12/23)

E. Dokumen

Dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor
1153/DJU/HM02.3/12/2018.

Dokumen SK KMA No 129/KMA/SK/VIII/2019.

